

## ABSTRAKSI

Perkembangan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan mengenai peranan investasi publik dan investasi swasta terus meningkat skalanya, baik dalam lingkup akademik maupun di tingkat perumusan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisa pengaruh investasi publik dan investasi swasta serta angkatan kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 1995 – 2009.

Pada penelitian ini berdasarkan pada fungsi produksi Cobb Douglas dengan pertimbangan kemampuannya untuk menunjukkan hubungan perimbangan antara hasil produksi dan kombinasi faktor produksi yang digunakan. Data yang digunakan adalah Data PDRB dan jumlah angkatan kerja yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Kudus; Data investasi sektor publik (belanja pembangunan) berdasarkan perhitungan APBD Kabupaten Kudus serta data investasi swasta dari Disperindagkop dan KPPT Kabupaten Kudus mulai tahun 1995 – 2009 (*time series*).

Model ekonometrik penelitian diestimasi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan dilakukan beberapa pengujian, termasuk di dalamnya uji penyimpangan asumsi klasik, uji F, uji t, maupun uji diagnostik dengan bantuan perangkat lunak E-Views 6.0.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi swasta dan investasi sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kudus dengan derajat  $\alpha$  10 % akan tetapi variabel angkatan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Kudus perlu menerapkan kebijakan yang dapat merangsang peningkatan investasi swasta, misalnya dengan penyederhanaan prosedur perijinan investasi. Di sisi yang lain harus pula dilakukan identifikasi secara cermat jenis investasi publik yang mempunyai pengembalian bersih terbesar dan bersifat komplementer terhadap investasi swasta, misalnya pembangunan infrastruktur.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Investasi swasta, Investasi sektor publik, Angkatan kerja